

POLICY BRIEF

“Mengawal Policy Brief Berdampak dalam Kebijakan Publik”

disusun oleh

Nur Khasanah Latief, S.IP
Ayun Sri Damayanti, S.H., M.H.

ditujukan kepada:

Lembaga Administrasi Negara

Executive Summary

Policy brief merupakan instrumen strategis untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti dalam pemerintahan. Namun dalam prakteknya, pemanfaatan policy brief masih sangat terbatas. Data Lembaga Administrasi Negara (2023) mencatat bahwa sekitar 68,3% kebijakan nasional periode 2020–2023 tidak mencantumkan referensi eksplisit terhadap kajian pendahuluan atau policy brief. Data ini mengamini hasil evaluasi Direktorat Hukum dan Regulasi Bappenas (2022) menunjukkan bahwa lebih dari 70% regulasi kepala daerah tidak dilandasi oleh naskah teknokratis atau kajian berbasis bukti.

Hal di atas disebabkan oleh dua kondisi utama: pertama, belum tersedia analisis kebijakan yang relevan terhadap isu aktual yang berkembang; dan kedua, meskipun kajian telah ada, pemanfaatannya belum optimal akibat tidak adanya dokumentasi terpusat dan lemahnya mekanisme advokasi ke pembuat kebijakan. Ironi bahwa meski ribuan analisis kebijakan telah dilantik dan tersebar penempatannya, serta ratusan policy brief diproduksi setiap tahunnya dampak terhadap kebijakan nasional belum optimal. Kenaikan signifikan jumlah pemangku jabatan fungsional analisis kebijakan dari 9 orang (2014) menjadi lebih dari 9.000 orang (2024) dianggap belum berkontribusi maksimal dan berdampak nyata jika diukur dari nilai Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) 2023 yang menunjukkan skor rata-rata nasional hanya sebesar 67,54. Disisi lain, produksi policy brief yang cukup banyak dari instansi pemerintah maupun perguruan tinggi belum sepenuhnya terdokumentasi pemanfaatannya dalam kebijakan nyata. Misalnya, data hasil pelacakan internal BRIN (2023) mencatat lebih dari 400 policy brief diproduksi sejak 2020 oleh unit kerja internal BRIN, hanya 11% yang tercatat memperoleh tindak lanjut dalam bentuk konsultasi kebijakan atau referensi regulasi.

Adapun langkah-langkah yang direkomendasikan dalam rangka mendorong policy brief berdampak dalam pengambilan kebijakan publik, yaitu penguatan peran LAN sebagai instansi Pembina, melalui; monitoring dan evaluasi kinerja analisis kebijakan, pengembangan platform digital policy brief satu pintu (Repository Policy Brief), mendorong regulasi internal di instansi pemerintah untuk pemanfaatan policy brief, dan penguatan pelatihan advokasi dan komunikasi kebijakan dalam pelatihan analisis kebijakan. Selain itu, LAN perlu menjalin kemitraan strategis antara BRIN dan Kemendagri/BRIDA melalui; terbangunnya forum konsultasi riset-kebijakan secara rutin dan peningkatan kapasitas SDM. Sinergi tersebut sangat krusial untuk menciptakan ekosistem kebijakan publik Indonesia yang responsif, berbasis data, dan berorientasi dampak nyata bagi masyarakat.

PENDAHULUAN

Pada proses perumusan kebijakan publik, keberadaan kajian kebijakan memegang peranan yang sangat penting sebagai dasar pengambilan keputusan yang berbasis bukti (evidence-based policy). Salah satu output dari kajian kebijakan yaitu policy brief. Policy brief merupakan dokumen ringkas yang menyajikan analisis isu kebijakan tertentu serta memberikan rekomendasi kebijakan berdasarkan bukti dan data yang relevan. Tujuan utamanya adalah untuk membantu pengambil keputusan dalam memahami suatu masalah dengan cepat dan mempertimbangkan solusi yang tepat.

Pengambilan kebijakan yang tanpa didahului oleh kajian yang memadai berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan pada saat implementasi. Ketika kebijakan disusun tanpa analisis mendalam dengan pendekatan kebutuhan masyarakat dan data yang jelas, maka besar kemungkinan solusi yang ditawarkan tidak menyentuh akar permasalahan yang seharusnya diselesaikan. Alih-alih justru memunculkan permasalahan baru berupa potensi inefisiensi anggaran, memperparah kesenjangan sosial yang ada, hingga hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Dalam praktik pemerintahan di Indonesia, masih banyak kebijakan yang lahir tanpa didahului/menggunakan telaahan kebijakan. Data Lembaga Administrasi Negara (LAN) berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kebijakan strategis nasional tahun 2023 mencatat bahwa sekitar 68,3% kebijakan nasional yang dirilis periode 2020–2023 tidak mencantumkan referensi eksplisit terhadap kajian pendahuluan atau policy brief (LAN, 2023: Laporan Monitoring IKK Nasional). Data ini memperkuat hasil evaluasi Direktorat Hukum dan Regulasi Bappenas dalam kajian kebijakan daerah pada tahun sebelumnya (tahun 2022) menunjukkan bahwa lebih dari 70% regulasi kepala daerah tidak dilandasi oleh naskah teknokratis atau kajian berbasis bukti (Bappenas, 2022: Evaluasi Tata Kelola Regulasi Daerah).

Kondisi kurangnya analisis kebijakan yang memadai ini akan melahirkan kebijakan yang kurang kontekstual, kurang tepat sasaran, dan berisiko gagal dalam implementasi. Tidak jarang, sebuah kebijakan meski memiliki niat/tujuan yang baik justru disinyalir lahir sebagai kebijakan populis semata karena dianggap kurang matang. Hal ini menyebabkan implementasi kebijakan menghadapi tantangan serius karena lemahnya pemetaan kebutuhan dan kesiapan daerah. Kebijakan seperti ini menjadi refleksi penting bahwa ketersediaan hingga pemanfaatan policy brief sebagai instrumen penghubung antara analisis dan kebijakan belum terintegrasi secara sistemik dalam proses pengambilan keputusan di Indonesia.

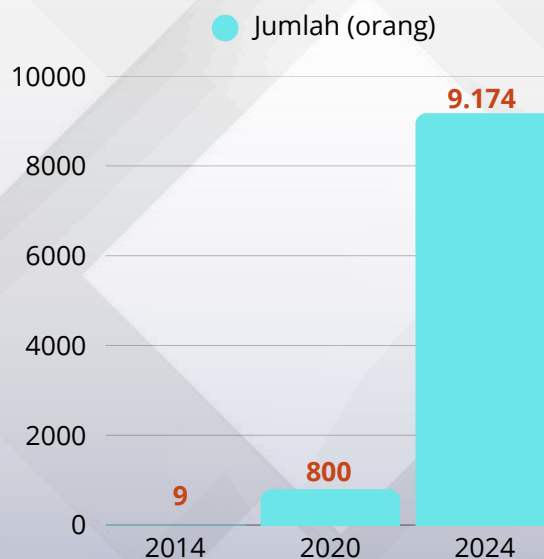
PENDAHULUAN

(lanjutan..)

Harapan terkait perbaikan kualitas kebijakan di Indonesia mulai terbangun sejak lahirnya jabatan fungsional analis kebijakan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 45 Tahun 2013 mengatur tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya. Dalam peraturan ini, Jabatan Fungsional Analis Kebijakan didefinisikan sebagai jabatan fungsional tertentu yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dalam lingkungan instansi pusat dan daerah. Salah satu output kerja dari seorang analis kebijakan berupa policy brief.

Berdasarkan data dari Pusat Pembinaan Analis Kebijakan Lembaga Administrasi Negara (PUSAKA LAN), jumlah jabatan fungsional analis kebijakan (JFAK) di Indonesia dalam kurun waktu 1 (satu) dekade ini menunjukkan peningkatan yang signifikan. Peningkatan tersebut didorong dengan adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi yakni pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional akibat delayering struktur organisasi pemerintahan.

Tabel 1. Data Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Analis Kebijakan

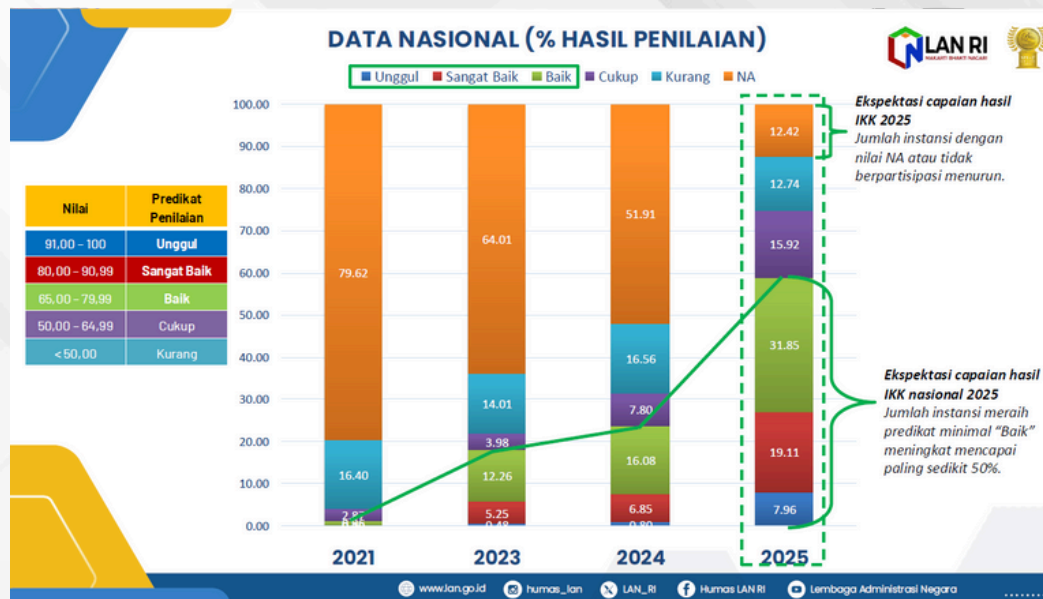


Peningkatan jumlah analis kebijakan ini merupakan langkah positif dalam upaya meningkatkan kualitas kebijakan publik di Indonesia. Sehingga harapannya, dengan cukup besarnya jumlah dan penyebaran jabatan fungsional analis kebijakan tersebut akan turut pula pada peningkatan kualitas kebijakan yang signifikan. Namun, berdasarkan hasil pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) yang dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada tahun 2023, rata-rata nasional IKK untuk seluruh instansi pemerintah di Indonesia masih berada pada angka 67,54. Nilai ini menunjukkan bahwa kualitas kebijakan di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Produktivitas analis kebijakan dalam melahirkan rekomendasi, khususnya bagaimana melakukan advokasi masih perlu dioptimalkan sehingga rekomendasi yang dihasilkan dapat dilirik dan dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan.

PENDAHULUAN

(lanjutan..)

Gambar 1. Grafik IKK 2021-2024 dan Target/ekspektasi IKK 2025
(Sumber: Data LAN dalam Forum Nasional Peningkatan Kualitas Kebijakan 2025)



Gambar di atas menunjukkan tren Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) nasional yang fluktuatif sekaligus mengkhawatirkan. Dari tahun 2021 hingga 2024, proporsi instansi yang tidak berpartisipasi dalam pengukuran masih sangat tinggi meskipun terus menurun, dari 79,62% menjadi 51,91%. Artinya, separuh lebih instansi pemerintah masih belum menjadikan pengukuran mutu kebijakan sebagai prioritas.

Data lainnya yaitu persentase instansi yang masuk kategori rendah (Kurang dan Cukup) konsisten berada di kisaran 20–24%, menandakan stagnasi dalam perbaikan kualitas di kelompok bawah. Meski terdapat peningkatan pada kategori Baik dan kemunculan instansi dengan predikat Sangat Baik dan Unggul, tren kenaikannya masih lambat dibanding target 2025 yang cukup optimis, yakni 50% instansi minimal meraih predikat Baik. Kondisi ini masih menunjukkan kesenjangan besar antara capaian aktual dan ekspektasi perbaikan mutu kebijakan nasional.

Fakta tersebut menguatkan pentingnya penguatan peran analis kebijakan dalam mendorong peningkatan IKK. Keberadaan lebih dari 9.000 analis kebijakan seharusnya menjadi modal besar. Diperlukan penguatan ekosistem kebijakan, agar target pengukuran IKK 2025 bukan hanya realistis untuk dicapai, tetapi juga dapat dijadikan momentum untuk memastikan kebijakan pemerintah benar-benar berbasis bukti dan berorientasi pada hasil.

DESKRIPSI MASALAH

Kebijakan yang lahir tanpa analisis yang memadai umumnya disebabkan oleh dua kondisi utama, yaitu:

Pertama, pada banyak kasus, belum tersedia analisis kebijakan yang secara spesifik merespons isu atau permasalahan yang ingin diatasi. Kajian kebijakan tidak selalu hadir tepat waktu atau tidak menjangkau isu-isu strategis yang berkembang secara dinamis di masyarakat dan pemerintahan. Ketidakhadiran kajian ini membuat pengambilan keputusan cenderung intuitif dan tidak berbasis data. Permasalahan ini disebabkan oleh:

- Kesenjangan waktu: Dalam situasi krisis, seperti bencana alam atau disrupsi pasokan energi, keputusan sering diambil sebelum kajian tuntas. Data Kementerian ESDM (2024) menunjukkan bahwa pada krisis energi regional 2023, 62% kebijakan daerah dikeluarkan tanpa rujukan kajian teknis.
- Keterbatasan fokus isu: Beberapa kajian bersifat terlalu umum dan tidak spesifik pada akar masalah. Hal ini terjadi karena perencanaan riset tidak selalu selaras dengan agenda kebijakan yang dinamis.
- Kapasitas analisis yang belum merata: Meskipun jumlah analisis kebijakan meningkat signifikan dari 9 orang (2014) menjadi lebih dari 9.000 orang (2024) (LAN, 2024), distribusi keahlian mereka belum sepenuhnya menjawab kebutuhan isu strategis yang beragam, menyebabkan *mismatch* antara kapasitas analisis dan kebutuhan kebijakan. Tantangan jabatan fungsional analisis kebijakan yang melonjak angkanya pasca penyederhanaan birokrasi adalah bagaimana agar pejabat yang mengalami perpindahan jabatan (struktural ke fungsional) dapat mengikuti pengembangan kompetensi khusus analisis kebijakan secara menyeluruh.

Kedua, meskipun analisis kebijakan sudah tersedia, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Kondisi ini disebabkan oleh:

- Ketidadaan sistem dokumentasi terpusat: Indonesia belum memiliki repository nasional yang menghimpun policy brief lintas sektor. Sebagai contoh, BRIN (2023) melaporkan bahwa dari ±400 policy brief yang dihasilkan unit internal BRIN, hanya 11% yang terdokumentasi pemanfaatannya dalam regulasi atau kebijakan. Universitas Indonesia melaporkan lebih dari 70 policy brief untuk Presidensi G20 dan pembangunan IKN, namun tingkat adopsi resminya oleh kementerian teknis kurang dari 20%.
- Minimnya mekanisme advokasi dan komunikasi kebijakan: Banyak policy brief disajikan dengan bahasa teknokratik, minim ringkasan eksekutif yang persuasif, dan tidak dilengkapi strategi advokasi yang efektif, sehingga gagal menjangkau pengambil keputusan. Selain itu, belum adanya pelatihan secara spesifik mengenai komunikasi kebijakan dan strategi advokasi sehingga menjadi hambatan dalam advokasi kebijakan yang membuat banyak rekomendasi kebijakan hanya berakhir sebagai dokumen arsip. Survei LAN (2023) pada 88 instansi pemerintah menunjukkan hanya 27% yang memiliki SOP atau regulasi internal yang mewajibkan penggunaan policy brief.

Permasalahan di atas menunjukkan perlunya langkah strategis dalam rangka membangun ekosistem kebijakan yang memungkinkan hasil kajian dimanfaatkan secara nyata dan berdampak terhadap peningkatan kualitas kebijakan publik.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, dihasilkan rekomendasi kebijakan agar hasil telaahan kebijakan berupa policy brief bisa berdampak bagi kualitas kebijakan. Alternatif pemecahan masalah yang dapat dijadikan sebagai langkah strategis selanjutnya bagi Lembaga Administrasi Negara sebagai instansi pembina jabatan fungsional analis kebijakan serta lembaga yang melaksanakan pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK), antara lain:

1 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Analis Kebijakan

LAN menginisiasi sistem monitoring nasional terhadap kinerja jabatan fungsional analis kebijakan, termasuk output policy brief yang dihasilkan dan tingkat pemanfaatannya dalam perumusan kebijakan publik. Penguatan posisi policy brief dapat dituangkan dalam kebijakan pengukuran kinerja fungsional analis kebijakan melalui policy brief berdampak dengan indikator penilaian SKP berupa jumlah policy brief yang dihasilkan, pemanfaatan/rekomendasi yang ditindaklanjuti serta kolaborasi kebijakan yang diinisiasi.

2 Platform Digital Policy Brief Satu Pintu (Repository Policy Brief)

LAN melalui Pusat Data internal dan BRIN dalam mengembangkan platform digital nasional yang menghimpun seluruh policy brief dari instansi pusat dan daerah. Platform ini tidak hanya berfungsi sebagai repositori, tetapi juga sebagai alat pemantau keterpakaian policy brief dan media pertukaran pengetahuan antarinstansi. Langkah teknis yang dapat ditempuh, antara lain:

- Pelibatan Pusdatin LAN dan BRIN dalam desain sistem dan integrasi dan interoperabilitas data
- Melakukan uji akses dengan K/L terkait beserta BRIDA Provinsi sebagai user awal
- Penyediaan dashboard pemantauan pemanfaatan policy brief dan akses publik

3 Advokasi ke Instansi Pemerintah

LAN telah melakukan langkah penguatan posisi policy brief dalam kebijakan pengukuran indeks kualitas kebijakan untuk nilai aspek perencanaan. Intervensi lainnya instansi yang menyelenggarakan pelatihan sekaligus penjaminan mutu, LAN dapat membuat regulasi yang mewajibkan policy brief produk pelatihan kepemimpinan dikaji dalam forum pengambilan keputusan di instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah sebagai salah satu indikator kinerja pelatihan kepemimpinan.

4 Pemutakhiran Modul Pelatihan Analis Kebijakan

LAN mendorong utilisasi jabatan fungsional analis kebijakan khususnya yang belum mengikuti pelatihan khusus analis kebijakan. Di sisi lain, LAN perlu memperkuat program pendidikan dan pelatihan fungsional maupun sertifikasi analis kebijakan dengan pemutakhiran modul yang secara khusus menitikberatkan pada penguatan kompetensi advokasi kebijakan, komunikasi kebijakan, dan pemanfaatan riset terapan dalam pengambilan keputusan.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

(lanjutan..)

5 Kemitraan Strategis dengan Kemendagri, BRIN dan BRIDA

Saat ini, banyak policy brief yang berhenti pada tahap dokumentasi tanpa diintegrasikan secara efektif dalam siklus pembuatan keputusan. Salah satu penyebab utamanya adalah belum optimalnya jembatan koordinasi antara lembaga riset pusat (BRIN) dengan jejaring riset dan inovasi di daerah (BRIDA). Sehingga, LAN perlu membangun kerja sama teknis dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) dengan BRIN dan Kemendagri untuk memperkuat sinergi antara penyedia data-riset dan pengguna analisis kebijakan (analisis kebijakan di instansi) serta peningkatan partisipasi pada pengukuran IKK. Melalui langkah-langkah tersebut, LAN tidak hanya bertindak sebagai pembina administratif, tetapi juga sebagai pendorong kualitas substansi kebijakan berbasis bukti. Sinergi antara LAN, BRIN dan Kemendagri akan menciptakan ekosistem kebijakan yang lebih responsif, adaptif, dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat. Langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam penguatan koordinasi BRIN-BRIDA dalam mendukung hasil telaahan kebijakan atau policy brief berdampak antara lain:

- Membangun Forum Konsultasi Riset - Kebijakan Terintegrasi; Menginisiasi forum koordinatif rutin antara BRIN, Kemendagri (BRIDA), dan pemangku kepentingan terkait di tingkat pusat dan daerah untuk menyelaraskan agenda riset dan kebutuhan kebijakan.
- Penguatan Capacity Building BRIDA; Berkolaborasi dengan BRIN dalam meningkatkan kompetensi SDM BRIDA khususnya para analis kebijakan dalam merumuskan, mengomunikasikan, dan mengadvokasikan policy brief agar lebih aplikatif dan responsif terhadap dinamika lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 2022. Evaluasi Tata Kelola Regulasi Daerah. Direktorat Hukum dan Regulasi Bappenas.
- Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). 2023. Laporan Pemetaan Policy Brief BRIN 2020–2023. Jakarta: BRIN.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). 2024. Evaluasi Kebijakan Penanganan Krisis Energi Regional 2023. Jakarta: Kementerian ESDM.
- Kementerian PANRB. 2024. Data Reformasi Birokrasi dan Indikator Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta: Kementerian PANRB.
- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 2023. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) – Modul Perencanaan dan Penganggaran.
- Lembaga Administrasi Negara (LAN). 2023. Laporan Monitoring Indeks Kualitas Kebijakan Nasional 2020–2023. Jakarta: Pusat Pembinaan Analisis Kebijakan LAN.
- Lembaga Administrasi Negara (LAN). 2025. Bahan Paparan pada Forum Nasional Peningkatan Kualitas Kebijakan Tahun 2025. Jakarta: Kedeputan Bidang Kajian Kebijakan Administrasi Negara LAN.
- Universitas Indonesia (UI). (2022). Policy Brief untuk Presidensi G20 dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara. Fakultas Ilmu Administrasi UI.